

Kitab Keagamaan, Radikalisme, Sekularisme, dan Masa depan Interaksi Umat Beragama

Daud Alfons Pandie

Program Studi Doktor Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

Correspondence: 762020011@uksw.student.edu

Abstract

This article analyzes the relationship between religious books, radicalism, and secularism for future interaction between religious communities in public spaces. The points in this article have been researched and discussed by various authors from various perspectives. However, this article is different because it attempts to analyze the relationship between the three principal entities in question. The research method used is qualitative by exploring writings or literature related to the focus of this article. The results of this research show that religious deradicalization can be carried out in encounters in the public space between secularism and Islam when religious texts are read and interpreted in new and multicultural contexts and spectrums. The main argument in this paper is that the future of religious interactions is also determined by how to read and interpret religious texts in public spaces.

Keywords: inter-religious, radicalism, sacred books, secularism

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kitab keagamaan, radikalisme dan sekularisme bagi masa depan interaksi antar umat beragama di ruang publik. Pokok-pokok dalam tulisan ini telah diteliti dan dibahas oleh berbagai penulis dari berbagai perspektif, akan tetapi tulisan ini berbeda karena di dalamnya berupaya menganalisis hubungan antara ketiga pokok entitas yang dimaksud. Metode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dengan menelusuri tulisan atau literatur yang berhubungan dengan fokus tulisan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa deradikalisi agama dapat dilakukan dalam pertemuan di ruang publik antara sekularisme dan Islam ketika teks-teks keagamaan dibaca dan ditafsirkan dalam konteks dan spektrum yang baru dan multikultural. Argumentasi utama dalam tulisan ini adalah bahwa masa depan interaksi umat beragama juga ditentukan oleh bagaimana membaca dan menafsirkan teks keagamaan di ruang publik.

Kata kunci: interaksi umat beragama, kitab keagamaan, radikalisme, sekularisme

Pendahuluan

Tulisan ini didasarkan pada asumsi bahwa radikalisme agama di ruang publik yang diekspresikan melalui berbagai tindak kekerasan, mempunyai kaitan dengan tafsir tertentu terhadap teks kitab keagamaan. Pertemuan antara agama dan Sekularisme di ruang publik sangat dinamis dan kompleks. Salah satu dampak dari pertemuan tersebut adalah terjadinya berbagai tindak radikalisme yang mengatasnamakan agama. Dalam kaitan dengan hal ini, radikalisme yang diekspresikan melalui tindakan ancaman, teror, dan pembunuhan menjadi contoh kasus yang dimaksud.

Radikalisme dalam sejarah kehidupan manusia selalu terkait dengan agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama memiliki peran dan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat yang kekuatannya melampaui politik dan kekuasaan. Agama dapat menjadi spirit yang menjustifikasi berbagai tindak kekerasan terhadap sesama umat manusia. Atas nama agama, radikalisme seringkali diekspresikan di ruang publik melalui cara-cara yang mengerikan. Hal ini dapat terlihat dari tindakan yang mengkafirkan orang yang berbeda

agama, menyerang tempat-tempat hiburan, menyerang dan membunuh mereka yang berbeda ideologi, bahkan menggulingkan kekuasaan negara atas nama agama.

Agama-agama pada hakekatnya hadir untuk membawa kemaslahatan bagi kehidupan dan peradaban manusia. Agama Islam selalu memosisikan dirinya sebagai yang *rahmatan lil alamin* yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai cinta kasih dan perdamaian. Agama Kristen memosisikan dirinya sebagai agama cinta. Tetapi dalam realitas, nilai-nilai tersebut telah direduksi dengan tafsir-tafsir keagamaan yang dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu dalam setiap agama. Hal ini berdampak pada dijadikannya teks kitab-kitab keagamaan sebagai justifikasi atas berbagai tindakan kekerasan dan radikalisme yang dilakukan di ruang publik. Pada akhirnya, yang diperlihatkan di ruang publik adalah klaim kebenaran (*truth claim*) yang didasarkan pada tafsir atau interpretasi teks kitab keagamaan sebagai justifikasi atas kekerasan dan radikalisme yang dilakukan di ruang publik.

Dalam konteks Indonesia, konstestasi politik seringkali menjadi ruang bagi politik identitas yang mengatasnamakan agama. Jikalau diamati respons terhadap peristiwa tersebut, ada indikasi selalu mengacu kepada teks-teks kitab keagamaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh teks kitab keagamaan masih sangat kuat dalam respons terhadap peristiwa tersebut. Meskipun demikian, jika diamati, tidak ada tafsir tunggal terhadap teks-teks keagamaan yang diacu untuk merespons peristiwa tersebut. Hal ini juga mengindikasikan bahwa ada latar belakang yang mempengaruhi tafsir terhadap teks-teks keagamaan tersebut. Pada satu sisi, tafsir terhadap teks kitab keagamaan mempertimbangkan aspek historis – antropologis, tetapi pada sisi lain, terdapat upaya sakralisasi teks kitab keagamaan yang mengisolasi teks dari konteks.

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pokok-pokok tentang kitab keagamaan, radikalisme agama dan sekularisme. **Syaiful Arif**¹, dalam tulisannya, “Islam, Radikalisme dan deradikalisasi berbasis Pancasila” mengemukakan bahwa radikalisme dalam agama Islam mempunyai sejarah yang panjang dan dicirikan oleh sikap dan perilaku yang eksklusif, mempunyai satu bentuk tafsir tunggal atas al-Quran dan menolak bentuk tafsir yang lain serta cenderung memakai tindakan kekerasan terhadap pihak lain yang tidak seideologi dengan mereka. **Dede Rodin**², dalam tulisannya, “Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat ‘kekerasan’ dalam al-Quran mengemukakan bahwa salah satu faktor utama radikalisme agama dalam Islam adalah penyimpangan dan kekeliruan dalam menafsirkan atas teks-teks al-Quran dan juga hadist Nabi saw tentang jihad dan perang. Teks-teks tersebut perlu ditafsirkan dengan melihat pada makna dan konteks kesejarahannya sehingga pada akhirnya dapat dipahami secara benar, holistik dan komprehensif. **Modie Alvianto Wicaksono**³ dalam tulisannya, “Dinamika Imigran Muslim di Perancis melalui Ruang Publik” mengemukakan bahwa interaksi antara imigran Muslim dengan warga Perancis yang sekuler sudah terjadi dalam waktu yang lama. Hal ini menimbulkan kekuatiran akan terkikisnya falsafah sekularisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. Hal ini justru menyangkali esensi dari sekularisme yang terlihat dari dibatasinya akses mengekspresikan perilaku keislaman di ruang publik.

¹ Syaiful Arif, “Islam, Radikalisme dan deradikalisasi Berbasis Pancasila”, *Societas Dei, Jurnal Agama dan Masyarakat*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2016. 240-266, <http://societasdei.rcrs.org/index.php/SD/article/view/37>.

² Dede Rodin, “Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-Ayat ‘Kekerasan’ dalam Alquran”. *Addin*, Volume 10, Nomor 1, Februari 2016, 29-60.

³ Modie Alvianto, “Dinamika Imigran Muslim Perancis melalui Ruang Publik, *Jurnal Transformasi Global*, Volume 4 Nomor 2, 2010. 1-23.

Dalam paparan selanjutnya, akan dikemukakan hasil dan pembahasan terkait dengan radikalisme agama di ruang publik dan tafsir kitab keagamaan, sekularisme dan interaksi antar umat beragama serta masa depan interaksi umat beragama yang memerlukan konstruksi terhadap konsep sekularisme dan juga pendekatan tafsir terhadap kitab keagamaan demi membangun kehidupan masyarakat yang terbebas dari tindakan ancaman, teror dan pembunuhan yang dilakukan atas nama agama.

Penelitian kualitatif dengan metode pendekatan kepustakaan digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami permasalahan dalam penelitian artikel ini. Sumber data diperoleh melalui pengumpulan dan identifikasi terhadap buku, artikel dan tulisan-tulisan yang relevan dengan pokok dan fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk menelusuri bukan hanya untuk memperoleh informasi, tetapi juga untuk memperdalam kajian teoritis, sehingga dapat memperkuat proposisi dan gagasan dari penelitian ini.

Radikalisme Agama di Ruang Publik dan Tafsir Kitab Keagamaan

Radikalisme agama dalam tulisan ini mengacu kepada perilaku dan tindakan kekerasan di ruang publik yang dilakukan oleh mereka yang mengatasnamakan umat Islam yang mendasarkan perilaku dan tindakan mereka pada doktrin agama. Sebagai gerakan keagamaan, radikalisme bersikap skriptualis dan mengidentifikasi dirinya adalah "*minhaju al-Salafi*" (jalan orang-orang terdahulu). Menurut Marx Juergenmeyer, radikalisme mengeskpresikan keyakinan agamanya sebagai tuntutan untuk melawan gagasan sekularisme Barat yang dipandang sebagai bertentangan dan berlawanan dengan nilai-nilai Islam.⁴

Secara genealogis, Rodin berpendapat bahwa radikalisme dalam Islam tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan kaum khawarij, suatu kelompok yang memisahkan diri dari mayoritas Muslim, pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib.⁵ Gerakan kaum Khawarij inilah yang kemudian sering dijadikan contoh upaya-upaya *takfirisme* oleh kaum Muslim, baik secara individu maupun organisasi. dalam Islam. Terlebih ketika kaum Khawarij ini mengabsahkan gerakan dan perilaku mereka dengan dua slogan, *La hakama illa lillah* (tak ada hukum selain bagi Allah) dan *la hukma illa Allah* (tak ada hakim yang lain selain Allah), didasarkan pada surat al-Maidah [5]: 44.⁶ Tidak mengherankan kalau kaum khawarij sangat mudah mengkafirkan sesama mereka yang berbeda pemahaman, apalagi mereka yang menentang pemahaman mereka mudah sekali untuk dibunuh dan dihalalkan darahnya.

Dari berbagai catatan sejarah, radikalisme atas nama agama dilakukan dengan mendasarkan pada tafsir dan elaborasi terhadap teks-teks dalam Alquran. Hal ini tercermin dalam sikap politik seperti yang dikemukakan di atas, sehingga mereka yang tidak sepaham adalah kafir dan dihalalkan darahnya untuk dibunuh. Bahkan mereka kemudian membagi dunia menjadi dua wilayah, yaitu *dar al-Islam* dan *dar al-kuffar*. Wilayah yang pertama adalah wilayah Islam yang dilindungi dan yang kedua adalah wilayah kafir yang harus diperangi.

Pada level bawah, radikalisme dalam agama Islam didasarkan pada sikap yang *puritan* yang berupaya memurnikan agama dari praktik kebudayaan modern yang dianggap kafir. Agama Islam dipahami sebagai yang murni datang dari Tuhan sehingga tidak boleh dinodai oleh budaya. Sedangkan pada level atas, radikalisme Islam diekspresikan melalui kekuasaan

⁴ Marx Juergenmeyer, *Teror In The Name Of God: The Global Rise of Religious Violence*. London: University of California Press, 2001. 7.

⁵ Dede Rodin, "Islam....."

⁶ Anzar Abdullah, "Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis," *Jurnal ADDIN* Volume 10 Nomor 1 (2016), 127.

dan politik dan menggunakan kekuatan bersenjata seperti yang dilakukan oleh organisasi ISIS di Suriah.

Dede Rodin, berpendapat bahwa radikalisme dalam Islam yang diekspresikan dalam tindakan kekerasan dan terror disebabkan oleh pemahaman yang menyimpang dan keliru terhadap ayat-ayat dalam al-Quran dan hadist Nabi tentang perang dan jihad⁷. Hal inilah yang menyebabkan *stereotype* Islam dan radikalisme semakin bertumbuh dan menimbulkan kembali gelombang Islamofobia, baik dalam hal agama, budaya maupun politik. Berbagai stigma seperti radikalisme, terorisme dilekatkan pada Islam.

Secara sederhana, radikalisme diekspresikan melalui beberapa sikap. Yang pertama, tidak mau menghargai dan toleran terhadap apa yang menjadi pendapat dan keyakinan pihak lain. Kedua, sikap fanatik yang berlebihan; hanya mereka yang benar dan pihak lain salah. Ketiga, pola hidup dan perilaku eksklusif, yang menekankan perilaku hidup yang berbeda kebiasaan masyarakat pada umumnya. Keempat, revolusioner, yakni melakukan tindak kekerasan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan.

Dalam konteks modern, secara umum, Syaiful Arif menyebut radikalisme sebagai gerakan yang bergerak lintas negara melampaui batas-batas teritori negara dan mengacu pada model atau pola keislaman Salafi.⁸ Pada mulanya, aliran ini hendak menegakkan kembali sistem politik *khilafah Islamiyah* dan pola hidup beragama yang berbasis pada Alquran dan hadist. Namun dalam perkembangan selanjutnya, aliran salafi tidak lagi hanya bergerak pada tataran pemurnian *credo* dan ibadah/ritual, tetapi juga pada tataran budaya, pemikiran sosial dan politik.⁹ Mereka kemudian tidak hanya mengecam dan berperang terhadap kaum *syiah*, tetapi juga terhadap berbagai kelompok *sunni* lain seperti Asy'ariyah, Hanafiyah, kaum sufi dan lain-lain.

Abdurrahman Wahid menggambarkan karakter kaum salafi di atas sebagai ketidakmampuan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam sistem pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan politik yang global dan modern¹⁰. Sikap radikal kemudian menjadi *escape way* untuk mendapatkan kembali eksistensi keislaman yang dianutnya. Mereka menolak sistem demokrasi, pluralism, sekularisme dalam kehidupan bernegara karena dalam pemahaman mereka tidak bersesuaian dengan norma-norma yang dianut oleh agama Islam.

Azumardi Azra berpendapat bahwa kebangkitan radikalisme dalam Islam disebabkan oleh berbagai hal. Pertama, pemahaman keagamaan yang literal dan tidak utuh terhadap teks-teks al-Quran dan hadist. Seperti konsep jihad yang sering disalahartikan oleh kaum salafi. Kedua, bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam. Ketiga, depravitasi dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, dan pada saat yang sama, disorientasi dan dislokasi di bidang sosial dan budaya sebagai dampak dari globalisasi menjadi faktor pendukung munculnya radikalisme.¹¹

Karen Armstrong berpendapat bahwa radikalisme Islam pertama-tama muncul oleh karena semangat kebangkitan Islam (*revivalisme Islam*). Sementara radikalisme Islam belaka-

⁷ *Ibid*, 39.

⁸ Syaiful Arif, "Islam, Radikalisme dan deradikalisasi Berbasis Pancasila", *Societas Dei*, Jurnal Agama dan Masyarakat, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2016. 240-266, <http://societasdei.rcrs.org/index.php/SD/article/view/37>. Salafi sendiri merupakan suatu aliran dalam agama Islam yang berupaya untuk memurnikan Islam (purifikasi), dari semua hal di luar Islam

⁹ Edi Susanto, "Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pesantren" *Tadris*, Volume 2, Nomor 1, 2007, 3.

¹⁰ Abdurrahman Wahid, *Islamic Fundamentalism, A Shouteast Asia Perspective*, (1981). 4.

¹¹ Azumardi Azra, *Konflik Baru antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 139.

ngan ini adalah merupakan respons Islam atas Barat¹². Terdapat dua persoalan yang menjadi perhatian gerakan kebangkitan Islam ini. Yang pertama adalah menolak sekularisme Barat yang memisahkan agama dan politik. Hal ini dianggap menjadi ancaman dan bertentangan dengan konsep keislaman yang tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau pemerintahan. Dan yang kedua, gerakan ini hendak menegakkan kekhalifahan Islam dan menginginkan syariat Islam yang berbasis pada al-Quran dan hadist Nabi sebagai pondasi hidup berbangsa dan bernegara.

Rubaidi mengemukakan beberapa ciri gerakan radikalisme di ruang publik sebagai berikut: pertama, menjadikan *khilafah* sebagai ideologi dalam mengatur kehidupan kenegaraan, sosial dan individual. Kedua, mengadopsi sumber nilai-nilai Islam dari teks keagamaan apa adanya tanpa melihat realitas dan perkembangan sosial. Ketiga, sakralisasi teks al-Quran dan hadist tanpa mempertimbangkan pendekatan yang kontekstual. Padahal teks tanpa konteks adalah sesuatu yang tidak mungkin. Keempat, menolak ideologi di luar ideologi mereka, termasuk ideologi Barat dengan sekularisme, demokrasi dan liberalismenya. *Kelima*, selalu mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah dan masyarakat umum.¹³

Dari paparan yang dikemukakan di atas, setidaknya ada beberapa karakteristik dari radikalisme di ruang publik yang dilakukan atas nama agama. Yang pertama adalah *sakralisasi* teks dan memahami teks kitab keagamaan (al-Quran dan Hadist) secara harafiah dan dielaborasi dengan kepentingan politik mereka. Upaya hermeneutik untuk memahami al-Quran dan hadist dari konteks historis, sosiologis dan antropologis ditolak oleh mereka. Kedua, menolak paham yang berbeda dengan keyakinan mereka, termasuk sekularisme yang dianut oleh negara-negara Barat. Ketiga, menolak pendekatan sosiologis, antropologis dan historis yang dianggap dapat menyelewengkan *kesucian* teks, dan pada akhirnya selalu menganggap bahwa hanya kelompok mereka yang berhak untuk menafsirkan teks kitab suci, sedangkan kelompok atau aliran yang lain adalah sesat. Beberapa ayat al-Quran yang seringkali ditafsirkan secara sempit dalam konteks radikalisme di ruang publik adalah ayat-ayat tentang perang dan jihad. Lub Liyna Nabilata menguraikannya sebagai berikut¹⁴:

Pertama, ayat ayat perang. Kata *qital*, yang diartikan sebagai perang. Kata ini ditemukan 12 kali dalam ayat-ayat al-Quran. Kata *qital* sendiri bermakna menghilangkan nyawa dari tubuh manusia. Kata ini misalnya terdapat dalam Q.S al-Haji [22]: 39-40 yang terkait dengan perintah perang dalam Islam oleh karena keadaan umat yang terusir dari kampung halaman mereka, sedangkan mereka yang tinggal diperlakukan secara kejam. Dalam konteks inilah Allah memerintahkan umat Islam berperang¹⁵. Dalam praktiknya, ayat ini sering ditafsirkan tidak sesuai dengan konteksnya. Seharusnya ayat ini dibaca sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan Q. S al-Baqarah [2]: 190 “*dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas*”. Ada persyaratan Nabi kepada para pengikutnya untuk tidak menyerang mereka yang lemah, orang tua, kaum wanita dan anak-anak serta umat agama

¹² Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, Jakarta: Serambi, 2001, ix.

¹³ A Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nadhlatul Ulama: Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010. 63.

¹⁴ Lub Liyna Nabilata, “Dekonstruksi Paradigma Radikal Dalam Al-Quran”, *Jurnal of Islamic Studies and Humanities* Volume 3 Nomor 1 2018. 45-66. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>.

¹⁵ A. Syalabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, 154.

lain yang sedang beribadah. Jadi, peperangan hanya untuk membela diri atau ditujukan kepada mereka yang kejam dan zolim terhadap umat.

Kedua, ayat-ayat jihad. Oleh kaum Salafi, jihad diartikan sebagai perang melawan musuh Islam. Akibatnya Islam dipandang sebagai agama teroris. Itulah sebabnya istilah jihad seringkali disalahartikan dan disalahpahami oleh para ahli dan pengamat Barat. Kata Jihad dalam al-Quran tidak boleh hanya dipakai untuk menjustifikasi tindak radikalisme dan peperangan. Sebagai doktrin agama, jihad merupakan amunisi doctrinal yang berfungsi sebagai alat perjuangan menjawab tantangan zaman.¹⁶ Teks-teks tentang jihad dalam al-Quran perlu ditafsirkan memakai prinsip-prinsip teks kitab suci dalam konteks khusus secara historis dan politis. Q. S. 22:78, “*Dan berjuanglah untuk Allah dengan sungguh-sungguh*” misalnya tidak identik dengan radikalisme dan kekerasan. Secara umum, jihad di dalam al-Quran dapat dijelaskan dalam beragam konteks pembahasan, namun secara substansif jihad adalah upaya untuk mewujudkan *as-salamah*, *al-salah*, dan *al-ihsan*, yakni memperjuangkan dan mewujudkan perdamaian, kesejahteraan umat sesuai ajaran al-Quran.

Inilah beberapa contoh penafsiran teks kitab suci agama yang sempit dan kemudian dijadikan sebagai alat untuk menjustifikasi ekspresi radikalisme agama. Penafsiran seperti ini pada gilirannya menunjukkan kurangnya pemahaman dan pendalaman terhadap substansi dan esensi dalam konsep dan nilai-nilai agama Islam. Islam kemudian hanya dipahami secara dangkal dan parsial.

Sekularisme dan Interaksi Antar-Umat Beragama

Sejak kurang lebih 100 tahun, Perancis telah menjadikan sekularisme sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Falsafah ini tentu saja tidak lahir begitu saja tetapi diperjuangkan dalam sebuah rentang sejarah yang panjang. Kesadaran ini muncul setelah rakyat menjadi capek dan lelah karena perang yang berkepanjangan atas nama agama. Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18 menjadi titik akhir hubungan antara gereja dan negara, antara agama dan dunia politik. Dalam konteks ini, sekularisme telah memisahkan individu dari paksaan agama dan menempatkan dirinya ke dalam komunitas politik sebagai warga negara perorangan”.¹⁷ Di Perancis, agama merupakan suatu kebebasan nurani dan kebebasan umum yang haknya dimiliki oleh setiap masyarakat. Persoalan politik dan persoalan agama dipisahkan dan tidak saling mencampuri. Agama menjadi urusan pribadi setiap individu.

Dalam perkembangannya, praktik sekularisme banyak menyimpan problem. Perlakuan diskriminatif seringkali dialami oleh komunitas-komunitas agama. Sebagai contoh, di bidang pendidikan pemerintah Perancis memberlakukan undang-undang yang menjamin agar pendidikan terbebas dari intervensi pandangan keagamaan tertentu.

Bagi kaum Muslim, Sekularisme dipahami secara negatif dan disamakan pengertiannya dengan hal yang kotor, jahat, duaniawi dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pada tataran global, para tokoh agama pada umumnya memandang sekularisme sebagai “bell kematian” bagi eksistensi agama-agama¹⁸. Sedangkan bagi para sosiolog, sekularisme dipan-

¹⁶ Abd. A’la, “Pembumian Jihad Dalam Konteks Indonesia Kekinian: Pengentasan Masyarakat Dari Kemiskinan dan Keterbelakangan”, *Harmoni*, Volume 8 Nomor 32, 2009. 55.

¹⁷, Modood dan Kastaryono, “Secularism, and Accomodation of Muslims Europa” dalam Tariq Moodod, Richard Zepata-Barrero, dan Anna Triandafyllidou (Ed.). *Multiculturalism, Muslim and Citienzenship: A European Approac*. London: Routledge, 2006.

¹⁸ Amin Mudzakir, “Sekularisme dan Identitas Muslim Eropa”, *Jurnal Kajian Wilayah*, LIPI, Volume 4 Nomor 1, 2013. 92-105.

dang sebagai konsep dan upaya yang mendestruksi warga negara dari kehidupan religious ke kehidupan yang materialistis.

Meski demikian, dalam kenyataannya ada beragam interpretasi terhadap sekularisme. Tidak ada bentuk tunggal dalam upaya memahami maupun praktik sekularisme. Sekularisme merupakan fenomena realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungannya dengan agama, kekuasaan dan politik. Dalam konteks Perancis, perjumpaan dengan kaum Muslim Imigran menjadi sesuatu yang menentang dan dinamis bagi masa depan sekularisme. Usaha pembatasan secara tegas oleh negara Perancis, mana wilayah agama dan mana wilayah negara, misalnya larangan menggunakan jilbab di ruang publik dan keinginan kaum Muslim untuk mengekspresikan identitasnya menjadi sangat dinamis. Ekspresi identitas kaum Muslim kemudian dianggap sebagai ancaman bagi konsensus politik sekuler.

Privatisasi agama yang mengarah kepada pembatasan masyarakat sipil akan hak politik dan kewarganegaraannya pada hakekatnya juga melanggar nilai-nilai dasar demokrasi. Semua itu perlu direkonstruksi kembali melalui kebijakan-kebijakan publik yang memberikan ruang kepada agama dalam mengekspresikan fungsi sosialnya.

Konstruksi Masa depan Interaksi Antar Umat Beragama

Berdasarkan paparan yang dikemukakan di atas, radikalisme agama yang diekspresikan melalui berbagai tindak kekerasan dan teror setidaknya disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama adalah penafsiran teks keagamaan yang sempit dalam hubungannya dengan relasi sosial. Dalam konteks kaum salafi yang dikemukakan di atas, yang juga terindikasi dalam beberapa respon lembaga dan tokoh publik, teks al-Quran ditafsirkan sedemikian berdasarkan kerangka teologi dan politik yang mereka anut. Tatanan masyarakat *khilafah* yang mereka cita-citakan direpresentasikan sebagai kehendak Tuhan berdasarkan hasil tafsiran mereka terhadap al-Quran. Tafsiran yang "sempit" seperti ini diunifikasi menjadi suatu realitas yang seragam sesuai cita-cita kelompok mereka. Di sinilah keberadaan kelompok dan aliran yang lain di luar mereka mulai dinafikan. Menurut Haryatmoko, tafsiran seperti ini memiliki kecenderungan menyembunyikan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.¹⁹

Kedua, terbentuknya identitas kolektif keagamaan yang terintegrasi dengan identitas yang membawa pada sikap yang fanatik dan sulit menerima keberadaan kelompok atau orang lain. Pada akhirnya terjadi stigmatisasi dan *stereotype* terhadap kelompok lain sebagai "kafir". Pada tingkat yang lebih ekstrim, tindak kekerasan dan bahkan pembunuhan terhadap mereka yang berbeda tidak lagi dianggap sebagai beban atau dosa, tetapi sebagai sesuatu yang wajar dan merupakan bagian dari "ibadah".

Ketiga, menguatnya legitimasi moral dan tatanan masyarakat yang sesuai dengan kerangka tafsir teologis yang dianut. Mereka tidak memerlukan lagi elemen-elemen lain dari luar seperti sekularisme, humanisme, demokrasi, pluralisme dan lain-lain. Nilai-nilai ini dipandang sebagai produk Barat yang kafir. Pada beberapa kasus radikalisme atas nama agama, sangat terlihat di mana sekularisme dengan nilai-nilai kebebasan yang diusung dianggap sebagai produk Barat yang kafir yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang dianut.

Lalu bagaimana dengan masa depan interaksi umat beragama? Semua agama di dunia hadir tanpa bersepakat terlebih dahulu, tetapi telah menjadi milik dunia yang melintasi

¹⁹ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta, Kompas, 2003. 64.

batasan-batasan geografis, etnis dan budaya.²⁰ Jikalau nilai-nilai agama tidak diinternalisasi dan direfleksikan menjadi nilai utama kehidupan, pada akhirnya agama akan menjadi kehilangan makna dan fungsinya. Nilai-nilai cinta kasih dan keadilan dalam agama menjadi tereduksi dan digantikan dengan perilaku dan tindak kekejaman dan kedengkian. Nilai-nilai utama agama tidak lagi memihak pada kebenaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan tetapi digunakan untuk menyerang pihak lain yang berbeda. Wajah menyeramkan dari agama lebih dikedepankan daripada wajah kedamaian dan cinta kasih.

Jika dirunut lebih jauh ke belakang, radikalisme diikuti oleh penggunaan teks-teks keagamaan untuk menjustifikasi radikalisme tersebut, sedangkan radikalisme sendiri sebenarnya adalah fenomena biasa yang tradisi agama apapun dengan berbagai varian dan dinamikanya. Dalam perjumpaan antara agama dengan sekularisme menimbulkan dinamika yang menjadi tantangan tersendiri bagi masa depan interaksi antar umat beragama. *Stereotype* Islam di mata masyarakat yang sekuler sering dikaitkan dengan fanatisme, kurangnya kebebasan dibatasinya hak perempuan dan lain sebagainya. *Stereotype* ini mengakibatkan pembatasan pendirian tempat ibadah dan berbagai pembatasan serta larangan lainnya. Peristiwa ini menggambarkan "rumitnya" relasi agama, politik dan kekuasaan yang terjadi di masyarakat. Pernyataan bahwa kebebasan adalah pilar penting demokrasi sering disalahpahami dan disalahgunakan, juga terkadang diterapkan secara tidak konsisten. Konsep *fraternity*, *equality* dan *liberty* yang mengutamakan kesetaraan antara warga negara dalam realitanya seringkali menjadi bias dalam praktiknya.

Dalam interaksi antar umat beragama ke depan, sebaiknya substansi dari agama dan sekularisme direkonstruksi. Teks-teks keagamaan perlu ditafsirkan kembali dengan *kacamata* yang berbeda tanpa menghilangkan substansi dan esensinya. Islam yang berintikan tauhid dan berbasis pada al-Quran dan hadist jika ditafsirkan dan dikomunikasikan secara efektif melintasi etnis/ras, kelas sosial dan budaya akan dapat diterima dengan baik. Demikian pula merekonstruksi kembali substansi dan esensi dari sekularisme dapat memberi kesempatan kepada umat beragama untuk berorganisasi, berkarir serta turut dalam dunia politik dan pemerintahan.

Kesimpulan

Radikalisme agama, sekularisme ada realitas sosial yang terjadi dalam perjumpaan antara agama dan aktor-aktor sosial di ruang publik. Sebagai realitas sosial, radikalisme dan sekularisme mempunyai kaitan erat dengan penfasiran terhadap teks-teks kitab keagamaan. Dalam konteks ini, peristiwa radikalisme agama perlu dilihat dari berbagai pandangan. Dari perspektif agama, teks kitab keagamaan seringkali dipakai untuk merespons peristiwa tersebut. Namun demikian, peristiwa ini juga bisa dilihat dari perspektif politik, ekonomi dan kekuasaan. Gerakan radikalisme agama sampai saat ini masih merupakan gerakan yang memiliki arus yang kecil dibandingkan dengan mayoritas agama-agama dunia. Hanya saja, gerakan ini selalu mencari momentum dunia, sehingga mendapatkan perhatian publik yang sangat mempengaruhi citra agama di ruang publik. Di masa depan, interaksi antar agama dan umat manusia membutuhkan kebebasan dan kedamaian serta terbebas dari tindakan kekerasan dan radikalisme. kebebasan yang dimaksud bukan kebebasan yang kebablasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang adil dan bertanggung jawab demi kedamaian dan keharmonisan hidup manusia. Pada ranah publik, teks-teks keagamaan perlu

²⁰ Pandie, D. A. (2018). Konsep "Satu Tungku Tiga Batu" Sosio-Kultural Fakfak sebagai Model Interaksi dalam Kehidupan Antarumat Beragama. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 5(1), 49. <https://doi.org/10.33550/sd.v5i1.78>

dibaca dan ditafsirkan kembali kepada substansi dan esensi agama dan esensi dari sekularisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, demokrasi, bersifat konstitusional dan menegakkan hukum. Prinsip dan perilaku yang menghargai kemajemukan, anti kekerasan, hingga penghargaan terhadap minoritas perlu dikembangkan.

Pada akhirnya, dalam perjumpaan antara sekularisme dan agama, agama perlu ditempatkan pada posisi yang tidak menjustifikasi politik dan kekuasaan. Agama harus dikembalikan kepada substansi dan esensinya, yaitu sebagai sumber etika dan moral bagi manusia dalam konteks masyarakat yang multikultural. Dalam konteks interaksi antar manusia dan antar umat beragama, kekerasan tidak boleh dihadapi dengan kekerasan.

Bibliografi

- Syaiful Arif, "Islam, Radikalisme dan deradikalisasi Berbasis Pancasila", *Societas Dei, Jurnal Agama dan Masyarakat*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2016. 240-266, <http://societasdei.rcrs.org/index.php/SD/article/view/37>.
- Dede Rodin, "Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-Ayat 'Kekerasan' dalam Alquran". *Addin*, Volume 10, Nomor 1, Februari 2016, 29-60.
- Modie Alvianto, "Dinamika Imigram Muslim Perancis melalui Ruang Publik, *Jurnal Transformasi Global*, Volume 4 Nomor 2, 2010. 1-23.
- Marx Juergensmeyer, *Teror In The Name Of God: The Global Rise of Religious Violence*. London: University of California Press, 2001.
- Anzar Abdullah, "Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis," *Jurnal ADDIN* Volume 10 Nomor 1 (2016)
- Syaiful Arif, "Islam, Radikalisme dan deradikalisasi Berbasis Pancasila", *Societas Dei, Jurnal Agama dan Masyarakat*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2016. 240-266, <http://societasdei.rcrs.org/index.php/SD/article/view/37>.
- Edi Susanto, "Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pesantren" *Tadris*, Volume 2, Nomor 1, 2007.
- Pandie, D. A. (2018). Konsep "Satu Tungku Tiga Batu" Sosio-Kultural Fakfak sebagai Model Interaksi dalam Kehidupan Antarumat Beragama. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 5(1), 49. <https://doi.org/10.33550/sd.v5i1.78>
- Abdurrahman Wahid, *Islamic Fundamentalism, A Shouteast Asia Perspective*, (1981). 4.
- Azumardi Azra, *Konflik Baru antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, Jakarta: Serambi, 2001.
- A Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nadhlatul Ulama: Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010.
- Lub Liyna Nabilata, "Dekonstruksi Paradigma Radikal Dalam Al-Quran", *Jurnal of Islamic Studies and Humanities* Volume 3 Nomor 1 2018. 45-66. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>
- A. Syalabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, 154.
- Abd. A'la, "Pembumian Jihad Dalam Konteks Indonesia Kekinian: Pengentasan Masyarakat Dari Kemiskinan dan Keterbelakangan", *Harmoni*, Volume 8 Nomor 32, 2009. 55.
- Modood dan Kastaryono, "Secularism, and Accomodation of Muslims Europa" dalam Tariq Moodod, Richard Zepata-Barrero, dan Anna Triandafyllidou (Ed.). *Multiculturalism, Muslim and Citienzenship: A European Approac*. London: Routledge, 2006.
- Amin Mudzakir, "Sekularisme dan Identitas Muslim Eropa", *Jurnal Kajian Wilayah*, LIPI, Volume 4 Nomor 1, 2013. 92-105.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta, Kompas, 2003.